

Research Article

KLINIK IPTEK MINA BISNIS: SEBUAH BUKTI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Agus Hadi Purwantomo

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (PIP), Semarang 50242, Indonesia

Corresponding author: hadipurwantomo@gmail.com

Received 10 Desember 2019; Accepted 4 April 2020 Available online 22 April 2020

ABSTRAK

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Walaupun tidak ada data yang pasti, karena dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam kategori petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis kegiatan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di provinsi Jawa Tengah melalui beberapa pendekatan antara lain komunikasi, advokasi/ pendampingan, dan konsultasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya pelaksanaan program tersebut. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kelembagaan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan melalui komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi dan sampel diambil dari beberapa wilayah pesisir yang ada di Jawa Tengah antara lain Cilacap, Kendal, Pekalongan dan Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kegiatan KIMBis sejauh ini belum maksimal masih terdominasi pelatihan untuk masyarakat dan keterlibatan stakeholders dipahami tidak terjadi secara optimal. Beberapa capaian dari kegiatan ini, yaitu (a) Meningkatnya orientasi kewirausahaan dan (b) Kualitas sumberdaya manusia berkembang cukup baik.

Kata kunci : mina bisnis ,kemiskinan, pemberdayaan, nelayan, Jawa Tengah

ABSTRACT

Fishermen are a group of people whose lives depend directly on sea products, either by catching or cultivating. They generally live on the beach, a residential neighborhood close to the location of their activities. Although there is no definitive data, because in the census of fishermen's work are included in the category of farmers, but admittedly their numbers are quite large. This research aims to describe, and analyze KIMBis activities as a forum for empowering fishing communities in Central Java province through several approaches including communication, advocacy / assistance, and consultation, as well as factors that support and hinder the implementation of the program. By using a descriptive

qualitative research design that aims to describe the KIMBis institution as a forum for empowering fishing communities through communication, advocacy / assistance, and consultation and samples were taken from several coastal areas in central Java, including Cilacap, Kendal, Pekalongan and Tegal. The results of this study indicate that KIMBis activities so far have not been optimally dominated by training for the community and the involvement of stakeholders is understood not to be optimal. Some of the achievements of this activity, namely (a) Increased entrepreneurial orientation and (b) The quality of human resources is developing quite well. As the largest archipelagic state in the world, Indonesia is endowed with vast marine resources and biodiversity.

Keywords: mina bisnis, poverty, empowerment, fishermen, Central Java

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, Indonesia dikaruniai sumber daya kelautan dan keanekaragaman hayati yang besar. Tapi hal ini tidak sebanding dengan kondisi pemanfaatan sektor kelautan. Berdasarkan data Kelautan Perikanan dalam angka Indonesia memiliki 17.499 buah pulau dengan panjang garis pantai membentang 80.791 km dan luas lautnya mencapai 3,25 juta km². Di samping itu, dikutip dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan potensi tangkap perairan laut Indonesia diperkirakan 7,3 juta ton/tahun yang secara ekonomi ditaksir 1,2 triliun dolar AS, atau setara 10 kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2012. Fenomena ini menjadi pemacu untuk memnfaatkan kekayaan laut yang dimiliki bangsa Indonesia, karenanya, melalui pendapat Kusnadi (2003, h.102) mengarah bahwa keberadaan potensi kelautan yang besar itu semestinya dapat dijadikan alasan pertimbangan beralihnya paradigma pemba-ngunan nasional dari daratan (land based orientation) ke maritim (ocean based orientation). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan SK Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Nomor 12.1/BALITBANGKP/ RS.210/I/2012 melaksanakan program peningkatan kehidupan nelayan dengan membentuk Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan nelayan dengan cara mengoptimalkan kekayaan lautnya. KIMBis, berdasarkan Petunjuk Teknis kegiatan (2011, h.1-2) dimengerti sebagai wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi di antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan stakeholder terkait, melalui pendekatan technopreneurship untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan tersebut. KIMBis dapat menjadi bagian atau cikal bakal pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui Research Extension Fisheries Community Network (REFINE) hal ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pengembangan teknologi perikanan dan kelautan oleh kementerian kelautan dan perikanan dengan para nelayan di wilayah pesisir pantura.

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Masyarakat kelautan perikanan di provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari kebutuhan teknologi dan inovasi untuk usahanya hal ini diperlukan karena teknologi menjadi dasar untuk merubah pola hidup dan pola pikir dai masyarakat pesisir, yang juga perlu diiringi dengan pendekatan kepada pelaku (nelayan, pembudidaya, dan petambak garam) agar teknologi inovasi itu dapat diterima oleh masyarakat. Dibentuknya KIMBis di kawasan pesisir/nelayan diperlukan karena disamping kebutuhan masyarakat semakin berkembang

yang bersamaan dengan itu kapasitas untuk memanfaatkan potensi lingkungannya masih terbatas, juga kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat nelayan semakin rumit, padahal mereka belum mampu menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri sehingga perlu pendampingan dari dinas kelautan dan perikanan. Klinik IPTEK Mina Bisnis dibentuk yang bertujuan untuk: 1) Mendorong tumbuhnya entrepreneurship di dalam masyarakat nelayan/pesisir sehingga mampu memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. 2) Mempercepat proses diseminasi, difusi, dan adopsi teknologi kelautan dan perikanan dan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki teknologi yang diintroduksi. Oleh sebab itu, dalam fungsi ekonomi KIMBis dibangun sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat nelayan berbasis IPTEK melalui pendekatan technopreneurship bersandar pada potensi sumberdaya di lingkungannya agar mampu mengoptimalkan sumber daya laut yang ada di sekitar mereka, dalam hal ini masyarakat pesisir terutama nelayan diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir. Secara tidak langsung juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi kepentingan atau kebutuhan antara sumber teknologi dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik demi tercapainya peningkatan taraf hidup mereka.

Selama bertahun-tahun kawasan pesisir dengan aktivitas kelautan baik itu nelayan maupun pembudidayaan ikan di laut sangatlah identik dengan kemiskinan hal ini menjadi ironi mengingat sumber daya alam laut yang melimpah akan tetapi masyarakat pesisir masih miskin. Pembangunan perikanan dan kelautan dimasa yang akan datang harus dilaksanakan secara lebih bijaksana, efektif dan efisien, sehingga pembangunan di sub sektor perikanan dan kelautan tidak hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelaku pembangunan perikanan secara adil, serta tetap terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan secara seimbang sehingga pembangunan perikanan dan kelautan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat hasil bagi masyarakat pesisir ibni secara berkelanjutan penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Durianto,et .al,2014 penelitian ini dikembangkan untuk mendapatkan konsep kebenaran umum tentang konsep KIMBis sehingga dengan pengambilan obyek lain diluar penelitian sebelumnya diharapkan akan mampu memperoleh hasil penelitian yang definit dan pasti terkait konsep KIMBis.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis kegiatan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di provinsi Jawa Tengah melalui beberapa pendekatan antara lain komunikasi, advokasi/ pendampingan, dan konsultasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya pelaksanaan program tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode deskriptif dengan tujuan memberikan peningkatan pemahaman mengenai mendeskripsikan, dan menganalisis kegiatan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di provinsi Jawa Tengah melalui beberapa pendekatan antara lain komunikasi, advokasi/ pendampingan, dan konsultasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya pelaksanaan program tersebut. Sampel diambil dari kabupaten yang memiliki wilayah pesisir antara lain Cilacap, Pekalongan, Tegal dan Kendal. analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisa data deskriptif dimana Teknik tersebut diambil dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di provinsi Jawa Tengah.

PEMBAHASAN

1. Kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis)

Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan provinsi Jawa Tengah tempat-tempat yang dipakai sampel dalam penelitian ini antara lain Cilacap, Pekalongan, Tegal dan Kendal memiliki 4 tempat pendaratan ikan, yaitu dengan pusat pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Nasional. Sumberdaya kelautan yang memadai dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan, maka provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai lokasi KIMBis dan berpotensi dapat diarahkan untuk mendukung: 1) Pengembangan industrialisasi perikanan. 2) Akselerasi pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan khususnya mendorong percepatan peningkatan produksi tangkap ikan. 3) Mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan, sebagai *implementing agency* program peningkatan kehidupan nelayan. Kendatipun, maka provinsi Jawa Tengah berpotensi secara ekonomi dari sumberdaya lautnya. Perlu dipahami, dipilihnya lokasi KIMBis karena 2 hal, yaitu potensi ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan dan hal pentingnya potensi itu belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir khususnya masyarakat miskin. Berdasarkan keterangan nelayan di wilayah pesisir Jawa Tengah merupakan sentra pengolahan hasil laut turun temurun di Jawa Tengah akan tetapi seluruh proses produksi masih menggunakan teknologi sederhana (peralatan tradisional) dan nilai tambahnya kurang, dari total penduduk sejumlah penduduk di Jawa Tengah rata-rata masyarakat yang ada di pesisir bekerja sebagai nelayan merupakan nelayan, dan armada penangkapan ikan berukuran kecil sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka hanya dengan hasil tangkapan dari mereka.

2. Pendapatan Rata-Rata Masyarakat

Hasil penelitian ini memperoleh hasil temuan bahwa pendapatan rata-rata tiap kepala keluarga hanya sebesar Rp. 1500.000,- perbulan. Karenanya, meskipun tingginya angka produksi sektor laut dan potensi perikanan yang tinggi, kenyataannya warga pesisir di kabupaten Cilacap, Tegal, Pekalongan Dan Kendal sebagai masyarakat nelayan di pesisir di provinsi Jawa Tengah belum bisa meningkatkan pendapatannya kalau kita melihat hasil penelitian diatas. Oleh karena itu, KIMBis beroperasi untuk mendorong entrepreneurship pada diri masyarakat nelayan/pesisir di Jawa Tengah dan sekitarnya dan membantu masyarakat di dalam merencanakan, mengambil keputusan bersolusi pada masalah usaha, dan mengarahkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan didukung teknologi dan inovasi di dalam kegiatan pemberdayaan melalui pendampingan pengurus di lokasi dengan harapan dapat mereduksi angka kemiskinan yang ada di masyarakat pesisir. Sehingga pada akhirnya mereka mampu mandiri dan percaya diri terhadap potensi kelautan yang ada di wilayahnya dan mampu meningkatkan ekonomi di kawasan pesisir. Berdasarkan keterangan, beberapa stakeholders pada kegiatan KIMBis ini, yaitu 1) Pemerintah Daerah: Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan peran sebagai pendukung kegiatan; 2) Pemerintah Pusat adalah Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) selaku inisiator sekaligus penanggung jawab kegiatan; 3) Tokoh masyarakat; dan 4) Kelompok-kelompok masyarakat nelayan (pelaku usaha, pengolah, pedagang, pembudidaya, dan kelompok garam) sebagai subjek dan objek yang diberdayakan. Susunan stakeholders ini pada dasarnya mengacu pada arahan pusat meskipun juga telah ada pengembangan dari pihak pelaksana lokasi, kendatipun demikian susunan ini tidak dibentuk dan ditetapkan secara baku oleh pemerintah daerah maka

provinsi Jawa Tengah sehingga mengakibatkan proses pelaksanaan teknis kegiatan menjadi tidak optimal.

Masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir Jawa Tengah dengan stakeholders terkait dilakukan dengan cara pelatihan. Kelompok masyarakat nelayan pada kegiatan KIMBis di wilayah Cilacap, Tegal, Pekalongan Dan Kendal di provinsi Jawa tengah , yaitu kelompok pengolah (pelaku usaha), kelompok budidaya. Pihak inisiator ataupun sumber utama yang memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk berkomunikasi adalah BBPSEKP terdukung pendampingan pengurus di lokasi, dengan membawa nilai-nilai inovasi dan teknologi pada proses pemberdayaan ini, yang dimaksudkan agar masyarakat mau dan mampu memecahkan masalah (problem solving) dan agar masyarakat dapat berkelompok terdukung pemberdayaan untuk masyarakat pesisir. Beberapa wujud inovasi dan teknologi yang telah diterapkan antara lain: a. Sertifikasi PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk pelaku usaha, dikegiatannya meliputi cara pengolahan yang baik, penerapan pengolahan mulai dari bahan baku hingga pemasaran, pemilahan bahan baku olahan, dan upaya menerapkan prinsip blue economy berkonsep zero waste pada setiap proses produksi. b. Upaya peningkatan kualitas garam tradisional dan inovasi pakan alternatif untuk budidaya ikan lele. c. Gagasan modernisasi alat pengolahan dari tradisional ke arah modern. d. Teknik pemasaran melalui website. Terdapat efek pada proses komunikasi ini, antara lain sertifikasi PIRT bagi para pelaku usaha, peningkatan pemahaman mengenai standarisasi (sterilisasi) pangan, dan meningkatnya kewirausahaan kelompok pengolah di wilayah Cilacap , Pekalongan, Tegal dan Kendal.

Kegiatan berupa advokasi/pendampingan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang dilaksanakan KIMBis di provinsi Jawa Tengah dijalankan oleh tim pelaksana (pengurus) di lokasi, yang terdiri dari Manajer KIMBis dan 3 Asisten Manajer dibantu seorang Liaison Officer, pendampingan ini dilaksanakan kepada para pelaku usaha dan kelompok masyarakat nelayan, diantaranya kelompok budidaya, kelompok pengolahan, dan kelompok pengusaha atau petani garam. Beberapa kegiatan pendampingan antara lain: a. Penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan. b. Pengurusan sertifikasi PIRT bagi pelaku usaha. c. Peningkatan kualitas usaha pengolahan garam tradisional. d. Transfer teknologi pembuatan pakan buatan dan pemijahan lele. e. Fasilitasi permohonan kebutuhan teknologi. f. Pembukaan akses terhadap peluang pasar berupa pameran dan pemasaran keliling. Beroperasinya KIMBis di Cilacap , Pekalongan, Tegal dan Kendal di provinsi Jawa Tengah sejauh ini belum maksimal hanya sebatas pelatihan untuk masyarakat. Terdapat temuan diantaranya peran dan keterlibatan stakeholders tidak terjadi optimal, artinya susunan stakeholders yang semestinya berinteraksi bersama masyarakat nelayan selain belum ditetapkan baku oleh Cilacap , Pekalongan, Tegal dan Kendal, juga pada keterlibatannya dalam kegiatan dipahami masih begitu rendah cukup dilaksanakan oleh pengurus lokasi pada kegiatan pelatihan dan pendampingan, kendati dalam beberapa kesempatan pelatihan juga didukung penyuluh dan pelaku usaha yang dianggap sesuai dalam memberikan materi kepada masyarakat sasaran. Keberadaan kegiatan KIMBis terdukung pemberdayaan yang dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan, manfaat dijalankannya kelembagaan yang dirasakan masyarakat adalah orientasi kewirausahaan meningkat dan kondisi kualitas SDM berkembang cukup baik. Berdasarkan keterangan, pelaku usaha yang mengikuti pelatihan dan pendampingan bahwasannya usaha yang mereka jalankan menjadi meningkat dan lebih profesional, pendapatan dan pelanggan semakin bertambah, meningkatnya pengetahuan produksi yang baik mulai pengolahan bahan baku hingga pemasaran, serta lebih memahami kebersihan (higienis dan steril) pangan dan proses produksi dengan penerapan program ini.

3. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis)

Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan KIMBis di maka provinsi Jawa Tengah sebagai kelembagaan yang berusaha mengatasi masalah pokok kemiskinan nelayan dengan cara menumbuhkan entrepreneurship pada diri masyarakat nelayan tersandar pengetahuan memadai dari teknologi dan inovasi untuk usahanya tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat dan pendukung didalam beroperasinya. Faktor internal yang mendukung adalah adanya keuntungan dari peran seorang Manajer klinik sebagai penyuluh dan ketua UPT Dinas KP Kabupaten. Sedangkan faktor penghambat internal adalah kurangnya intensitas komunikasi di antara masyarakat dengan stakeholder, dan adanya sarana penunjang operasionalisasi. KIMBis berupa petunjuk teknis kegiatan dianggap pelaksana lokasi kurang sesuai dengan lokasi atau realitas di lapangan. Faktor eksternal yang mendukung adalah adanya dukungan dan komitmen Pemerintah maka provinsi Jawa Tengah yang cukup besar diantaranya meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan, keterlibatan dan komitmen penyuluh, dan dukungan pemerintah di kabupaten Cilacap, Tegal, Pekalongan Dan Kendal sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat adalah adanya resistensi dan respon dari masyarakat sasaran, dan belum adanya regulasi lanjutan ataupun kebijakan yang menguatkan KIMBis di provinsi Jawa Tengah terkait penerapan program KIMBis.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan, KIMBis dalam kegiatannya berupaya mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan di Cilacap , Pekalongan, Tegal dan Kendal , yang dikarenakan tidak mampu secara mandiri dalam mengakselerasi produksi dan memberikan nilai tambah usahanya, maka hadirnya KIMBis melalui proses pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuhnya jiwa entrepreneurship tersandar teknologi dan inovasi yang memadai pada diri masyarakat nelayan dan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia khususnya masyarakat pengolah di Kabupaten Cilacap, Tegal, Pekalongan Dan Kendal. KIMBis pada kegiatannya juga tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat secara internal dan eksternal yang menjadi ancaman dan peluang di masa depan. Beberapa hal yang menjadi pendukung, yaitu 1) Keuntungan tambahan atau terdapat nilai positif dengan adanya peran manajer klinik sebagai penyuluh dan ketua UPT Dinas KP Kecamatan; dan 2) Keberadaan dukungan yang cukup besar dari Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sedangkan hal yang menjadi penghambat, yaitu 1) Kurang dan lemahnya kualitas komunikasi diantara masyarakat nelayan dengan stakeholders terkait; 2) Adanya resistensi dan respon dari masyarakat sasaran terhadap kegiatan KIMBis; 3) Belum adanya regulasi lanjutan ataupun kebijakan yang menguatkan KIMBis di maka provinsi Jawa Tengah kegiatan ini seakan hanya bersifat kegiatan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan saja. Beberapa hal di atas, dimengerti dan dapat dijadikan pertimbangan agar dimasa depan capaian kinerja KIMBis dapat efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan pada khususnya dan masyarakat maka provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami berikan kepada segenap pihak yang telah bersedia membantu proses penelitian , segenap tim ahli yang juga telah memberikan masukan demi kekritisan dan kualitas hasil dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfabeta. McNabb, D. E. 2002. *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative Approaches*.
- Alfabeta. Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul anastesinya?*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Arikunto Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta, Rineka Cipta.
- Armonk, NY: M. E. Sharpe. *Profil Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 2012*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri. Jakarta
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2009. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta : Dep PU.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2009. *Pemberdayaan dan Kerelawanan*. Jakarta : Dep PU.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2009. *Pembangunan Partisipatif*. Jakarta : Dep PU.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT.KKP). (2014). *Kebijakan dan Program Pembangunan Perikanan Tangkap*. Diakses melalui http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/arsip/c/253/kebijakan-dan-program-pembangunan-perikanantangkap/?category_id=14 [diakses pada tanggal 03 Mei 2014].
- Durianto, Robert. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)* *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, Hal. 22-28.
- Edi Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung.
- Friedman, Jhon. (1992). *Empowerment: The Politic of Alternative Development*. Cambridge, Blackwell.
- Gajanayake, S and Gajanayake, J. 1993. *Community Empowerment: A Participatory Training Manual On Community Project Development*. New York, PACT Publications.
- Harsono, Boedi. 2006. *Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta, Media Pustaka. Indonesia
- Humaniora. Kusnadi. 2000. *Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung.
- Humaniora. M Jafar Hafsah. 2008. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Institut For Religious and Institutional Studies (iris) Press.
- Kanisius Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut.

- Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. Cetakan ke-3. Jakarta, Rineka Cipta. Mardikanto,
- Kusnadi. 2006. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Bandung.
- Loekman Soetrisno. 2005. Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan. Yogyakarta :
- Maritim Institut. 2010. Perspektif Pembangunan Negara Maritim Berbasis Kelautan dan Perikanan, Bengen. D.G. Jakarta. Kelautan dan Perikanan dalam Angka tahun 2013. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. 2001. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu, Nikijuluw. Bogor, PKSPL-IPB
- Refika Aditama. Ginandjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta. Pustaka Dicisendo. H a l a m a n | 27
- Salim, E. 1984. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan. Jakarta, Yayasan Idayu.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Ketiga. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Zulham, A. 2011. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Klinik IPTEK Mina Bisnis Dalam Mendukung Program Peningkatan Kehidupan Nelayan. Jakarta, BBPSEKP.